

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menganalisis tentang wacana relasi kuasa antara negara dan rakyat dalam dua lagu dari Grup Band .Feast, yaitu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* dalam mini album “Beberapa Orang Memaafkan”. Album tersebut merupakan karya responsif atas fenomena bom di Surabaya pada Mei 2018 lalu. Fenomena tersebut menjadi pemantik terjadinya proses elaborasi materi lagu yang akhirnya turut mengangkat kritik – kritik sosial lainnya terhadap fenomena – fenomena sosial di Indonesia. Band .Feast memanfaatkan penciptaan lagu, terutama pada elemen lirik dalam lagu yang mampu menyampaikan suatu bentuk resistensi terhadap pemerintah/negara. Kritik terhadap suatu fenomena sosial tertentu bisa diangkat menjadi sebuah lirik lagu yang bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.

Penciptaan lagu tidak sekedar untuk mencapai fungsi hiburan, tetapi juga terdapat gagasan – gagasan yang ingin disampaikan. Melalui bahasa, komunikator dapat menyampaikan gagasannya kepada komunikan. Kata yang diucapkan, simbol yang diberikan, dan intonasi pembicaraan tidaklah semata – mata sebagai ekspresi pribadi atau cara berkomunikasi, tetapi dipakai dengan sengaja untuk maksud tertentu (Rahardjo, 2011:64). Lagu memiliki elemen lirik yang menjadi elemen penting dalam lagu, lirik mengandung pilihan - pilihan kata sebagai bahasa yang sengaja disampaikan oleh pembuat lirik. Lirik dalam lagu berfungsi sebagai media yang universal dan efektif dalam penyampaian gagasan ideologis untuk tujuan tertentu, misalnya kritik sosial, kritik terhadap negara, kritik terhadap fenomena sosial maupun politik, dan lain – lain.

Bahasa bisa digunakan sebagai pembentukan wacana dalam sebuah lagu. Dalam konteks pembentukan wacana, wacana yang dikirim bukanlah sekedar pesan yang diharapkan dapat dipahami penerima, melainkan juga bertujuan untuk dipercaya (Rahardjo, 2011:66). Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam lirik lagu tidak hanya dimaknai secara apa adanya saja, terdapat struktur bahasa yang sengaja digunakan untuk menyampaikan opini dari pembuat lirik. Pemilihan kata –

katanya pun sengaja dibentuk untuk membangun suatu wacana tertentu dengan konteks sosial tertentu pula. *Language embodies and articulates the experience of social struggle, transition, and contest, and consequently the linguistic sign is seen as deeply ideological* (Blommaert, 2006:511). Sehingga peneliti melihat lirik lagu sebagai teks penggunaan bahasa yang akan dianalisis sebagai wacana tertentu untuk menyampaikan gagasan secara ideologis dalam lagu.

Tidak sedikit musisi – musisi Indonesia yang terkenal dengan karya lagu – lagunya yang mengangkat keresahan mereka terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Musisi lawas Indonesia, Iwan Fals, terkenal dengan karya – karyanya terkait kritik politik dan keadilan sosial di Indonesia pada saat itu. Lirik – lirik yang diciptakan Iwan Fals sangat kental dengan bahasan kritik terhadap negara, misalnya pada lagu – lagunya yang berjudul *Surat Buat Wakil Rakyat*, *Tikus Tikus Kantor*, *Bongkar*, dan masih banyak lagi. Menurut penelitian dari Wahyuning Prastiwi (2017), karya music yang diciptakan Iwan Fals sebagian besar menyampaikan gagasan tentang keadaan sosial dan politik yang terjadi, setiap karyanya mewakili setiap gagasan dan kritiknya terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam lagunya yang berjudul *Surat Buat Wakil Rakyat*, Iwan Fals menyampaikan gagasan bahwa sudah jelas kinerja para wakil rakyat di Indonesia belum mencapai kata memuaskan, belum mencapai kata merakyat untuk menjadi wakil dari rakyat. Sedangkan dalam lagunya yang berjudul *Tikus Tikus Kantor*, Iwan Fals menyampaikan gagasan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia, koruptor digambarkan seperti tikus – tikus kantor yang rakus dan suka bersembunyi di balik meja.

Berkembangnya industri musik di Indonesia memunculkan musisi – musisi lain yang juga turut menyuarakan kritik sosial politik melalui karya musik. Lima musisi yang menjadi pilihan CNN Indonesia pada tahun 2016 yang juga menyuarakan kritik sosial politik, antara lain Slank, Efek Rumah Kaca, Navicula, Nosstress, dan Supermaan Is Dead (Putra, 2016).

Efek Rumah Kaca, band *indie* era tahun 2000-an, cukup terkenal dengan kritik politiknya dalam beberapa lagunya, terutama pada lagu – lagunya yang berjudul *Ilmu Politik*, *Lara di Mana Mana*, *Ada Ada Saja*, dan lain – lain. Penelitian

terdahulu dari Agil Setiawan (2017), melalui ketiga lagu tersebut, Efek Rumah Kaca merespon peristiwa politik dengan sudut pandang kontra terhadap kelas penguasa, menunjukkan bahwa hubungan antar kelas penguasa dan yang dikuasai sebagai korban buah intrik politik. Pada lagunya yang berjudul *Lara Di Mana Mana*, menyampaikan gagasan tentang kematian seseorang secara ekonomi, sosial, politik akibat ketidakberdayaan kekuasaan karena perbedaan kelas sosial. Lagu tersebut menampilkan penderitaan rakyat kelas yang dikuasai sebagai korban buah intrik politik.

Melalui lagu lainnya yang berjudul *Ada Ada Saja*, Efek Rumah Kaca mengingatkan kita bahwa ada – ada saja kelakuan atau karakter tokoh politik dan masyarakat dalam menyikapi persoalan politik. Lagu tersebut menunjukkan pertentangan karakter kedua kelas tersebut, kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Ketiga lagu dari Efek Rumah Kaca tersebut juga menjelaskan adanya praktik hegemoni oleh kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai.

Selain itu, penelitian lainnya dari Adam Pasha (2018) menganalisis wacana nasionalisme dari lirik lagu *Sama Rata Sama Rasa* dari Band Charlie's Rum and The Chaplin. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa lagu tersebut menggambarkan masyarakat yang diharapkan dapat memiliki kesamaan rasa untuk melenyapkan jurang pemisah yang membuat manusia seakan tidak peduli dengan kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Lagu tersebut menceritakan identitas bangsa dan upaya untuk terus menyuarakan semangat nasionalisme seperti di jaman sumpah pemuda.

Fenomena – fenomena tersebut menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa lagu, terutama pada elemen lirik, dapat menjadi media kritik sosial politik yang mudah diterima oleh masyarakat luas. Lirik lagu juga sebagai sarana pembentukan wacana – wacana tertentu dalam penciptaan sebuah karya musik yang semakin digandrungi oleh musisi – musisi Indonesia sebagai wujud kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi sosial politik Indonesia saat ini.

Kritik sosial dan politik yang dibawa dalam lagu menjadi wacana yang cukup menarik bagi beberapa musisi dalam penciptaan lagu. Setelah bergulingnya Orde Baru, masyarakat semakin gencar menyuarakan gagasannya dalam bentuk yang bermacam – macam, salah satunya dalam seni musik. Sebagian masyarakat

semakin peka dengan fenomena – fenomena sosial politik yang terjadi di Indonesia, yang akhirnya menjadikan fenomena tersebut menjadi suatu wacana yang ingin disampaikan ke ruang publik yang lebih luas.

Wacana sendiri menurut Hawthorn adalah komunikasi kebahasaan yang terlibat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya (Hawthorn dalam Badara, 2012:16). Definisi tersebut menjelaskan bahwa pesan yang dibentuk untuk dikomunikasikan dalam rangka tujuan – tujuan sosial tertentu membentuk suatu wacana tertentu. Wacana dapat dimaknai berdasarkan konteks – konteks sosialnya yang berkaitan dengan tujuan – tujuan sosial tertentu dalam wacana tersebut.

Oleh karena itu, dalam buku Rachma Ida (2018:89), analisis wacana akan melakukan dekonstruksi interpretasi dan “pembacaan” peneliti terhadap suatu masalah atau teks – teks sosial politik. Asumsinya adalah bahwa setiap teks itu sudah dikondisikan/dikonstruksi dan melekat dalam diskursus atau wacana yang telah dibentuk.

Jika kita berbicara mengenai kritik sosial dan politik dalam fenomena – fenomena sosial, maka erat kaitannya dengan relasi kuasa antara penguasa dan kelompok – kelompok subordinat. Melihat dari perspektif ideologi menurut Marx yang dijelaskan oleh Strinati (2010:207), gagasan – gagasan kelas penguasa semakin mengemuka dan mendominasi pemikiran kelompok – kelompok subordinat, dan karena itu dominasi ideologis berfungsi mempertahankan sistem ketidaksetaraan kelas. Gagasan – gagasan tersebut yang mendasari munculnya fenomena – fenomena sosial politik sehingga menimbulkan suatu konflik tertentu dalam hubungannya antara kedua kelas tersebut.

Jika merujuk pada pemahaman tentang ideologi dari Althusser (2014), maka dominasi ideologis yang dimaksud di atas adalah hakikat ideologi yang sebenarnya, yang cenderung membentuk wacana yang manipulatif karena realitas yang sebenarnya disembunyikan dibalik wacana tersebut. Berkaitan dengan konsep kekuasaan, Althusser juga menyebutkan bahwa ideologi dapat membentuk individu berdasarkan ideologi dari suatu kelompok masyarakat tertentu, maka ideologi hakikatnya melayani kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Hakikat

ideologi tersebut yang tentunya akan membentuk suatu relasi dalam struktur kekuasaan yang ada, seperti misalnya pada sistem kekuasaan dalam suatu negara. Melalui relasi tersebut, muncullah ketundukan terhadap aturan-aturan melalui berbagai aparatus yang berada di wilayah suprastruktur. Negara dianggap sebagai ‘mesin represi’ untuk memastikan dominasi kelas yang berkuasa atas rakyat (Althusser, 2014).

Adanya dominasi dari suatu ideologi, khususnya kelas penguasa, erat pula kaitannya dengan konsep hegemoni dari Gramsci. Strinati (2010:262), menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sesuatu yang berasal dari perjuangan kelas maupun sosial yang pada gilirannya berfungsi membentuk dan mempengaruhi. Dominasi ideologi atau konsep hegemoni dalam konteks ini berhubungan dengan relasi kuasa dalam suatu institusi, yang merujuk pada sebuah institusi yang disebut negara. Hal tersebut yang kemudian Foucault (1982a) sebut sebagai modek kekuasaan “Governmentality”, dimana merupakan perluasan model relasi kuasa pada level negara, sehingga akan berbicara mengenai isu teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara (Mudhoffir, 2011). Bisa dikatakan bahwa governmentality merupakan bentuk relasi kuasa yang akan berpusat pada kepentingan negara dan selalu akan di bawah kontrol negara. Penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominan terhadap subjek yang didominasi, sehingga subjek tersebut tidak memiliki ruang untuk bermanuver atau menentukan pilihan dalam bertindak (Foucault, 1982a).

Dalam kaitannya dengan konsep governmentality, Strinati (2010:261) pun menjelaskan bahwa dalam perspektif ini, budaya populer dapat diinterpretasikan dalam pengertian perjuangan melawan hegemoni (governmentality) yang dijalankan di dalam institusi – institusi masyarakat sipil. Hal tersebut menerangkan bahwa budaya populer, dalam konteks ini karya seni musik/lagu, bisa dijadikan sebagai bentuk kritik sosial dari perspektif masyarakat sipil terhadap penguasa yang menjalankan praktik hegemoni atau governmentality menurut istilah Foucault.

Grup band .Feast merupakan salah satu musisi yang menggunakan lagu sebagai media kritik sosial yang membawa wacana relasi kuasa antara negara dan rakyat di dalamnya. Feast yang biasa ditulis .Feast merupakan grup musik *rock* asal

Indonesia yang beranggotakan Baskara Putra sebagai *Vokalist*, Adnan S.P dan Dicky Renanda sebagai *Guitarist*, Fadli Fikriawan sebagai *Bassist*, dan Adrianus Aristo Haryo sebagai *Drummer*. Grup band ini terbentuk dari sekumpulan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2012. Lagu pertama mereka berjudul “*Camkan*” rilis pada tahun 2014 yang bercerita tentang kegelisahan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

.Feast merupakan grup band yang memang sejak awal memiliki perhatian dan kepentingan terkait kritik – kritik sosial dalam lagu – lagunya. Album pertama mereka yang dirilis pada 18 September 2017, berjudul *Multiverses*. Album tersebut merupakan album perdana yang dikemas sebagai suatu album yang variatif, karena terdapat beberapa musisi – musisi terkenal lainnya yang turut berkolaborasi dalam setiap lagu – lagu di album tersebut. Seperti Ramengvrl, Bam Mastro, Mardial, Oscar Lolang, Haikal Azizi, dan masih banyak lagi. Album tersebut menjadi album kolaboratif dengan beragam genre di dalamnya. Secara garis besar menyampaikan kritik – kritik sosial atas fenomena sosial yang diciptakan oleh .Feast sendiri dalam belahan dunia lain, atau bisa dikatakan fiktif. Mereka menggunakan istilah *Earth 3*, *Earth 4*, dan sebagainya untuk membedakan dunia yang diciptakannya dalam album tersebut.

Berbeda dengan album pertama, pada 21 September 2018, .Feast mengeluarkan mini album yang berjudul *Beberapa Orang Memaafkan* dengan latar tempat *Earth 2* yang berarti bumi kita saat ini dengan fenomena – fenomena yang actual terjadi. Mini album tersebut murni sebagai karya responsif atas suatu peristiwa di Indonesia yaitu bom Surabaya pada Mei 2018. *Single* pertama dalam mini album tersebut berjudul *Peradaban*, yang berisi tentang kemarahan dan kegelisahan mereka atas peristiwa bom Surabaya, dengan kritik – kritik intoleransi beragama di Indonesia. Isu tersebut menjadi pemantik bagi Baskara Putra sebagai pencipta lirik, untuk mengelaborasi materi lagu sehingga tercipta 6 lagu dengan fenomena yang berbeda – beda yang berlatar di Indonesia.

Menurut Widia (2018), secara keseluruhan, *Beberapa Orang Memaafkan* semakin membuat .Feast bersinar dengan konsistensi tema, musik, serta instrumen, serta membawa kita pada berbagai realita kelam yang terjadi di Indonesia dengan nada satir dan sarkastik. Beberapa lagu dari mini album *Beberapa Orang*

Memaafkan tersebut yang menjadi objek penelitian ini. Mini album tersebut berisi lagu – lagu yang berjudul *Apa Kata Bapak, Peradaban, Kami Belum Tentu, Minggir!, Padi Milik Rakyat*, dan *Berita Kehilangan*. Berdasarkan data dari Spotify, terhitung sampai 14 Juni 2019, jumlah total pendengar bulanan lagu-lagu .Feast adalah sebanyak 133.063 pendengar.

Peneliti memilih dua lagu dari mini album *Beberapa Orang Memaafkan* untuk dijadikan sebagai objek penelitian, diantaranya *Kami Belum Tentu* dengan jumlah 1.305.896 pendengar dan *Padi Milik Rakyat* dengan jumlah 688.531 pendengar. Alasan peneliti memilih dua lagu tersebut menjadi objek penelitian adalah karena kedua lagu tersebut memiliki benang merah wacana yang sama dan cukup kuat, yaitu relasi kuasa antara negara dan rakyat terhadap negara dalam lirik lagunya.

Sehingga peneliti tertarik melakukan analisis tekstual pada lirik lagu milik .Feast sebagai media kritik sosial karena terdapat wacana dibalik teks lirik tersebut atas fenomena sosial yang relevan dengan konteks dan kondisi sosial politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis wacana dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode tersebut karena akan berfokus pada pembacaan dan interpretasi atas teks – teks dalam lirik lagu yang diartikulasikan sebagai sebuah wacana, menghubungkannya dengan konteks atau kondisi sosial budaya yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

Bagaimana relasi kuasa antara negara dan rakyat diwacanakan dalam lirik lagu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* milik Band .Feast?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi relasi kuasa antara negara dan rakyat dalam lirik lagu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* milik Band .Feast

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian studi ilmu komunikasi mengenai lirik lagu yang menggunakan analisis tekstual. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi penelitian analisis lagu yang mengangkat persoalan mengenai fenomena – fenomena sosial yang terjadi, dalam hal ini wacana relasi kuasa yang dibangun dalam lirik lagu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti kajian studi komunikasi dalam hal pemanfaatan media dan budaya komunikasi, salah satunya melalui seni musik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kepekaan terhadap fenomena – fenomena sosial yang diwacanakan melalui lagu, khususnya teks – teks dalam lirik lagu.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Lirik Lagu sebagai Wacana

Bahasa dapat dipahami sebagai alat komunikasi yang mengandung makna-makna tertentu yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, setiap penggunaan bahasa oleh manusia selalu bersifat ideologis (Mubaligh, 2010:116). Setiap manusia memiliki nilai-nilai ideologi tersendiri yang ingin disampaikan melalui bahasa. Sedangkan Hawthorn dalam Badara (2012:16) menjelaskan wacana sebagai bentuk komunikasi kebahasaan. Sehingga dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, terdapat ideologi yang disampaikan dan wacana-wacana yang terbentuk dari ideologi tersebut.

Teks merupakan salah satu produk dari bahasa, seperti lirik lagu yang merupakan teks dan bagian dari bahasa. *Attention to language ideologies has had an impact on at least two aspects of study of text, ideological dimension of transmission of texts and introduction of indexicality in the analysis of text* (Blommaert, 2006:512). Sehingga teks

dalam lirik lagu dapat memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan ideologis dan wacana yang terbentuk; dan juga sebagai bentuk penyampaian simbol-simbol tertentu berdasarkan konteks yang sedang terjadi.

Lagu diciptakan tidak hanya sekedar memenuhi fungsi hiburan saja, tetapi terdapat opini dan nilai – nilai ideologis yang sengaja ingin disampaikan oleh pencipta lagu. Salah satu elemen lagu yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah lirik lagu. Menurut Awe (2003:51), lirik lagu dimaknai sebagai permainan kata – kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik, dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan pengarangnya.

Melalui lirik lagu, pencipta lagu dapat menggunakan bahasa sebagai pembentukan wacana – wacana tertentu dalam lagunya. Dalam konteks pembentukan wacana, wacana yang dikirim bukanlah sekedar pesan yang diharapkan dapat dipahami penerima, tetapi bertujuan untuk dipercaya dan dipatuhi (Rahardjo, 2011:66). Penggunaan bahasa dalam lirik lagu dapat mengandung dan mengartikulasikan fenomena-fenomena sosial yang terjadi, perjuangan sosial, sehingga bahasa dipandang secara ideologis dan mampu menyampaikan wacana-wacana dari ideologi tersebut (Blommaert, 2006:511)

Seperti penjelasan di atas, wacana merupakan pengungkapan maksud – maksud tersembunyi dari pembuat teks (pencipta lagu) tersebut. Menurut Roger Fowler, wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dapat mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman (Eriyanto, 2001:2). Merujuk pada pengertian tersebut, wacana dalam lirik lagu digunakan untuk merepresentasikan suatu pandangan dan pengalaman dari pencipta lagu secara ideologis.

Pembentukan wacana dalam lirik lagu dipahami sebagai pesan tersirat dalam sebuah lagu. Wacana disini dipandang melalui paradigma kritikal, dimana suatu wacana tidak hanya dilihat sebagai teks bahasa yang netral, tetapi ada faktor – faktor di luar bahasa tersebut yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Thwaites dalam Ida (2018:101) menyebutkan beberapa

karakteristik wacana, yaitu adanya konteks sosial, peran yang terlibat dalam konteks sosial tersebut, relasi kuasa dalam peranan tersebut, dan tema – tema tertentu yang dibicarakan dalam konteks sosial.

Pencipta lagu atau musisi melihat berbagai fenomena dalam konteks sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu persoalan. Persoalan tersebut yang kemudian diartikulasikan dalam bahasa dan pilihan diksi – diksi yang sesuai untuk disampaikan pada khalayak luas, dengan meletakkannya pada lirik lagu. Penggunaan bahasa dalam lirik lagu tersebut digunakan untuk membentuk suatu wacana berdasarkan konteks sosial budayanya. Seperti yang dikatakan oleh Foucault dalam Smiers (2009:372), pada prinsipnya wacana itu tidak ada batasnya, wacana ‘berkembang biak’ tanpa batas akhir. Maka dari itu, pembentukan wacana dengan menggunakan alat komunikasi yaitu bahasa, akan terus berkembang seiring dengan munculnya fenomena – fenomena sosial yang terjadi dalam suatu konteks sosial tertentu dalam masyarakat.

1.5.2 Industri Musik *Indie*

Perkembangan industri musik di Indonesia semakin beragam, khususnya dengan kemunculan band – band dan label - label *indie*. Istilah *indie* disini merupakan singkatan dari *independent* atau mandiri dan bebas. *Term ‘indie’ traditionally art –music, film, literature or anything that its under the broad banner culture –created outside of the mainstream and without of the mainstream and without corporate financing* (Andrews, 2006). Industri musik besar atau yang biasa disebut industri musik *mainstream* dikelola oleh label – label major/besar mendominasi industri musik di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Wenz dalam Rez (2008:26), yang dimaksud dengan istilah *mainstream* dalam konteks ini adalah arus utama, tempat band – band yang bernaung di bawah label besar, sebuah industri yang mapan. Band – band yang tergabung dalam label besar tersebut terjamin dalam hal distribusi dan promosi. Sehingga ada beberapa kriteria untuk menjadi band yang tergabung dalam label musik yang *mainstream*.

Berkaca dari kekuatan label major tersebut, maka beberapa musisi merasa adanya dominasi dari label – label major tertentu yang merepresi musisi – musisi yang tidak tergabung dalam label major. Sehingga musisi – musisi tersebut memunculkan istilah *indie* sebagai bentuk gerakan bermusik dan perlawanan terhadap industri musik *mainstream*. Band – band musik *indie* memproduksi lagu dan albumnya sendiri tanpa dinaungi oleh label. Seiring perkembangan musik – musik *indie* di Indonesia, mereka secara kolektif menciptakan label sendiri yang disebut label *indie*. Menurut Rez (2008:26), label *indie* menjunjung tinggi semangat DIY (*do-it-yourself*), yaitu merekam, mendistribusikan, dan mempromosikan dengan uang sendiri.

Menurut Putranto dalam Anggit (2017), terdapat tiga jenis label rekaman dalam industri musik, antara lain :

a. Label Major

Di Indonesia sendiri, label major dibedakan jadi dua bagian, yaitu Label Major Internasional (Universal, Sony BMG, Warner, EMI, dll) dan Label Major Lokal (Musica Studio's, Aquarius Musikindo, Nagaswara, Trinity Optima Production, dll). Label major biasanya dimiliki oleh para pengusaha elit yang memiliki dana untuk mengorbitkan musisi – musisi dibawah naungannya.

b. Label *Indie*

Sebagian orang mendeskripsikan label ini membangun jalur distribusi alternatif sendiri, tidak mengikuti jalur label major, sedangkan sebagian lainnya mendeskripsikan sebagai sebuah gairah dalam mempromosikan musik – musik *non-mainstream* dan bebas bereksplorasi dalam musik. Contoh label *indie* di Indonesia yaitu Aksara Records, deMajors, Darlin Records, Kolibri Records, dan lain – lain.

c. Label Net

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut industri musik untuk melakukan inovasi, maka lahirlah fenomena baru dalam mendistribusikan musik secara digital melalui label net (internet label). Beberapa label net di Indonesia antara lain Yes No Wave Music,

Inmyroom Records, dan lain – lain. Mereka mengandalkan media sosial sebagai sarana promosi musik mereka.

Semakin maraknya label *indie*, salah satunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi terutama dalam industri musik. *In fact, with the assistance of digital technology, indie musicians have further isolated themselves away from the corporate system –today, they are able to more easily practice the DIY lifestyle using the internet* (Jensen, 2013:34). Dengan hadirnya internet, musisi bisa dengan mudah dalam produksi dan distribusi musik melalui berbagai *platform* penyedia musik. Selain itu, para pendengar mendapatkan akses yang mudah di setiap *platform* yang tersedia, sehingga musisi bisa mendapatkan penghasilan dari *platform* tersebut.

Beberapa label *indie* di Indonesia yang menurut Thee (2017) dalam media *online* alternatif vice.com memberikan sajian musik kontemporer di Indonesia, antara lain Leeds Records, Nanaba Records, Kolibri Rekords, Tandem Tapes, Trogmagnon Records, Elevation Records, Yesnowave, Grimloc, Orange Cliff, dan Hema Records. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Thee (2017) juga menjelaskan bahwa peningkatan animo mendirikan label *indie* terbantu oleh penggemar musik yang semakin lihai menggunakan media sosial dan akses informasi ke berbagai panduan mendirikan perusahaan rekaman DIY.

1.5.3 Lagu sebagai Media Kritik Sosial

Kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat akan mengalami suatu perubahan dan tidak dapat dipungkiri pula jika tidak ada perubahan. Perubahan bisa ke arah yang lebih baik ataupun buruk. Ketika kondisi sosial tidak mengalami perubahan atau mengalami perubahan yang tidak seharusnya, maka hal tersebut yang menjadi pemantik munculnya kritik – kritik sosial dari beberapa kalangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kritik sendiri adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi

sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem atau proses bermasyarakat (Akbar, 1997:44).

Kritik sosial juga dapat diartikan sebagai inovasi sosial, dimana menjadi sarana komunikasi gagasan – gagasan baru—sembari menilai gagasan – gagasan lama—untuk suatu perubahan sosial yang diinginkan masyarakat (Akbar, 1997:45). Kritik sosial terkadang dianggap sebagai tindakan subversif, karena dianggap menentang dan tidak percaya dengan sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, dengan menggunakan kekuasaannya, Soeharto melarang berbagai narasi – narasi yang mengandung kritik sosial terhadap pemerintah melalui pers – pers saat itu.

Setelah masa Reformasi, yang menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat, larangan – larangan seperti masa Orde Baru tidak lagi berlaku. Alternatif yang tersedia bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya di ruang publik semakin beragam, termasuk kritik – kritik sosial. Salah satu alternatif yang mudah diterima dan memiliki daya serap tinggi bagi masyarakat luas adalah melalui karya seni, yang di dalamnya terdapat seni musik, visual, audio visual atau film, dan sebagainya.

Seperti yang dijelaskan oleh Smiers (2009:5), seni adalah juga bagian dari perjuangan sosial melalui ekspresi – ekspresi kesenangan, kemarahan, hasrat, kehalusan budi, kekuasaan, sinisme, atau ketakutan yang dapat dibagikan bersama orang lain seperti pemikiran – pemikiran mana yang diinginkan atau ekspresi – ekspresi mana yang tidak disetujui. Dalam hal ini, karya seni yang dimaksud adalah seni musik/lagu. Beberapa musisi atau pencipta lagu merasa tidak puas atas kondisi sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga mereka menyuarakan bentuk kritik – kritik sosial melalui lagu sebagai media.

Albert Camus (2017:1) mengatakan bahwa seni sama halnya seperti pemberontakan. Seniman memiliki kecenderungan untuk menciptakan karya yang menentang dan melawan suatu hal yang tidak sesuai dengan ideologinya. Karya-karya tersebut yang kemudian berusaha untuk

dikomunikasikan kepada penikmatnya agar merasakan halnya yang sama dan bisa turut sepakat dalam bentuk pemberontakan tersebut.

Kritik-kritik sosial disini bisa dipahami sebagai bentuk pemberontakan terhadap suatu hal yang bertentangan dan berkaitan dengan ketidakpatuhan pada hal tersebut. Pemberontakan para seniman terhadap kenyataan dunia dan bagi kaum revolusioner-totalitarian ini dicurigai mengandung penegasan yang sama seperti pada pemberontakan spontan kaum tertindas (Camus, 2017:9). Pelaku seni dapat menjadi perantara kaum-kaum tertindas tersebut dalam menyampaikan gagasan-gagasannya terhadap kaum yang menindas melalui karya seninya.

Mengutip dari tulisan milik Leon Trotsky (2017:42), para penyair, pelukis, pemahat, dan musisi otomatis akan menemukan pendekatan dan metode-metode mereka sendiri dalam perjuangan untuk membebaskan kelas dan rakyat tertindas, yang akan membuyarkan awan skeptisisme dan pesimisme yang menutupi cakrawala kemanusiaan. Seperti musisi, mereka memiliki metode dengan memaksimalkan lirik dan musiknya dalam menyampaikan wacana kritik-kritiknya sebagai bentuk perjuangan dan pemberontakan.

Seni musik/lagu menjadi media yang mudah diterima karena merupakan bagian dari budaya populer saat ini. Para musisi mengartikulasikan bentuk kritik – kitiknya melalui elemen – elemen yang terdiri dari musik, lirik, dan nilai estetika musik itu sendiri. Secara tidak langsung, mereka menggunakan musik/lagu sebagai media penyampai kritik – kritik sosial dan nilai – nilai ideologis tertentu. Smiers (2009:9), juga mengibaratkan bahwa musik dan lirik menyiramkan bahan bakar ke dalam nyala api ketegangan sosial dan personal yang telah ada. Sehingga memicu musisi – musisi lain dan juga masyarakat untuk meningkatkan kepekaannya terhadap kondisi sosial yang terjadi.

1.5.4 Ideologi, Hegemoni, dan Relasi Kuasa

Munculnya kritik sosial dalam masyarakat disebabkan karena tidak adanya atau adanya perubahan sosial yang tidak sesuai dengan keinginan

masyarakat. Pihak yang menentukan ada tidaknya perubahan sosial dalam masyarakat adalah kelas – kelas penguasa dalam suatu institusi, dalam hal ini adalah negara. Marx mengatakan bahwa negara dapat dipahami sebagai alat atau aparatus yang represif, sehingga Marx menggunakan istilah aparatus negara atau *the state of apparatus* (Althusser, 1971:70)

This term (the state apparatus) covers not only the specialized apparatus (in the narrow sense) whose existence and necessity follows, as we have seen, from the requirements of legal practice –that is, the police, courts and the prisons –but also the army, which, apart from its ‘national defence’ role (the proletariat has paid or this experience with its blood) (Althusser, 1971:70)

Merujuk pada penjelasan di atas, yang disebut sebagai negara juga meliputi institusi-institusi tertentu yang bekerja di dalamnya, seperti pemerintahan, polisi, tentara, penjara, dan lain-lain. Dalam pemahaman Althusser, aparatus negara atau institusi-institusi tersebut dianggap memiliki ideologi yang melekat, sehingga Althusser membagi aparatus negara dalam dua kategori, antara lain ISA (*Ideological State Apparatus*) dan RSA (*Repressive State Apparatus*).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedua kategori tersebut dan bagaimana aparatus negara bekerja melalui ideologi, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang penjabaran Althusser mengenai ideologi itu sendiri. Althusser (2014) menjelaskan bahwa ideologi merupakan representasi yang tidak merefleksikan realitas, melainkan mendistorsinya. Maka dari itu, ideologi cenderung membentuk wacana yang manipulatif karena realitas yang sebenarnya disembunyikan dibalik wacana tersebut. Berkaitan dengan konsep kekuasaan, Althusser juga menyebutkan bahwa ideologi dapat membentuk individu berdasarkan ideologi dari suatu kelompok masyarakat tertentu, maka ideologi hakikatnya melayani kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut.

Hakikat ideologi tersebut yang tentunya akan membentuk suatu relasi dalam struktur kekuasaan yang ada, seperti misalnya pada sistem kekuasaan dalam suatu negara. Melalui relasi tersebut, muncullah ketundukan terhadap aturan-aturan melalui berbagai aparatus yang berada

di wilayah suprastruktur. Negara dianggap sebagai ‘mesin represi’ untuk memastikan dominasi kelas yang berkuasa atas rakyat (Althusser, 2014). Aparatus yang berada di wilayah suprastruktur yang dimaksud Althusser adalah RSA (*Repressive State Apparatus*) dan ISA (*Ideological State Apparatus*), dan melalui kedua aparatus tersebutlah negara bekerja untuk mempertahankan dominasi kekuasaan yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan Althusser (2014), pembagian aparatus negara tersebut berdasarkan bagaimana cara bekerjanya terhadap masyarakat. Pertama, RSA (*Repressive State Apparatus*), aparatus yang berkaitan dengan hukum dan peraturan negara, maka dari itu RSA bekerja secara represif dalam bentuk kontrol yang bersifat koersif. Pada hakikatnya, RSA berada dalam sistem dan struktur kekuasaan negara sehingga bekerja untuk membawa individu dari masyarakat ikut dalam ideologi negara secara paksa. Contoh dari RSA antara lain, polisi, tentara, penjara, administrasi, pengadilan, dan lain-lain.

Sedangkan ISA (*Ideological State Apparatus*) merupakan aparatus yang bekerja melalui ideologi dengan bentuk kontrol yang konsensual. Pada hakikatnya, ISA berfungsi untuk memanipulasi kesadaran masyarakat untuk menerima ideologi dari kelas dominan dengan sukarela, dan berada di dalam maupun di luar kekuasaan negara. Seperti contohnya, agama, pendidikan, keluarga, budaya, dan lain-lain. Jika ditelusuri lebih dalam, bisa dikatakan ISA dalam negara bekerja lebih berbahaya karena berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menerima ideologi negara yang bersifat manipulatif. Secara tidak langsung terjadi proses penundukan masyarakat terhadap ideologi negara dan wacan dibalik ideologi tersebut. Sehingga secara tidak langsung pula terjadi relasi kuasa antara negara dengan masyarakat melalui aparatus-aparatus tersebut, ISA maupun RSA.

Adanya relasi kuasa yang terjalin dalam sebuah negara antara kelas penguasa dengan kelas yang dikuasai (kelompok – kelompok subordinat), memunculkan adanya praktik hegemoni yang mendominasi. Praktik – praktik tersebut yang memicu kelas – kelas yang dikuasai dan didominasi untuk melakukan resistensi terhadap praktik hegemoni tersebut. Gramsci

memaparkan bahwa perubahan sosial adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi (Maryani, 2011:54).

Berdasarkan konsep tersebut, Gramsci menjelaskan bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah (Patria & Arief, 1999:120). Strinati (2010:189) juga menjelaskan konsep ideologi milik Marx, bahwa terdapat masyarakat yang didominasi dan kelas yang mendominasi, kelas penguasa dan kelompok – kelompok subordinat yang dikuasai. Relasi kuasa yang terjadi dalam suatu masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan, ada satu pihak yang memiliki kuasa dan otoritas lebih atas pihak lainnya.

Marx dalam Strinati (2010:207) menjelaskan bahwa gagasan - gagasan kelas penguasa semakin mengemuka dan mendominasi pemikiran kelompok – kelompok subordinat. Pemaparan konsep ideologi oleh Marx yang mendorong Gramsci dengan konsep praktik hegemoninya. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sarana kultural dan ideologis bagi kelompok dominan (kelas penguasa) dalam masyarakat untuk menciptakan negosiasi konsensus ke dalam kelompok – kelompok yang didominasi. Konsep praktik hegemoni tidak dapat dipisahkan dengan konteks historis yang memosisikan kelompok dominan (kelas penguasa) sehingga mampu meyakinkan kelompok yang didominasi terhadap posisi kelompok dominan tersebut (Maryani, 2011:53).

Konsep hegemoni terkait dengan tiga bidang, antara lain adalah ekonomi (*economic*), negara (*state*), dan rakyat (*civil society*), (Bocock, 2007). Kelas – kelas penguasa menggunakan kekuasaannya sebagai kontrol ekonomi dan politik terhadap kelompok yang dikuasai / kelompok subordinat. Selain kontrol secara ekonomi dan politik, kelas penguasa menggunakan praktik hegemoni untuk menunjukkan kredibilitas dan cara pandangnya mengenai kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga kelompok – kelompok subordinat melihat hal tersebut sebagai bentuk tindakan yang wajar dari kelas penguasa. Fase hegemoni yang dimaksud Gramsci (dalam Simon, 1999) adalah ketika berhasil melakukan dominasi terhadap kelas yang didominasi, maka fase hegemoni merupakan suatu

tahap yang sampai pada kesadaran dalam konsepsi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Gramsci menggunakan hegemoni untuk menunjukkan adanya struktur kelas dalam masyarakat, yang berkuasa mengontrol yang tidak memiliki kuasa.

Merujuk pada pandangan Gramsci, Fairclough memaparkan pandangannya terhadap praktik hegemoni yang menjadi bagian dari kerangka teori dalam analisis wacana.

“Hegemony is leadership as well as domination across the economic, political, cultural and ideological domains of a society. Hegemony is the the power over society as a whole of one of fundamental economically defined classes in alliance (as a bloc) with other social forces, but it is never achieved more than partially and temporarily, as an ‘unstable equilibrium’” (Fairclough, 1995:76)

Hegemoni dalam pemahaman di atas digambarkan sebagai bentuk kekuasaan untuk mendominasi wilayah tertentu dalam suatu masyarakat, terutama dalam wilayah ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Praktik – praktik hegemoni membentuk suatu aliansi yang saling berintegrasi, tetapi menghasilkan kondisi yang tidak stabil dalam masyarakat karena adanya pemberontakan – pemberontakan dalam masyarakat.

Gramsci dalam Patria dan Arief (1999:128-129), mengemukakan bahwa terdapat tiga tingkatan hegemoni, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum.

a. Hegemoni Total (Integral)

Memiliki ciri adanya afiliasi massa yang mendekati totalitas, masyarakat menunjukkan adanya persatuan moral dan intelektual tokoh. Biasanya tampak pada hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

b. Hegemoni yang Merosot (*Decadent Hegemony*)

Adanya potensi disintegrasi dalam dominasi ekonomis borjuis dalam masyarakat modern, disintegrasi yang dimaksudkan adalah “mentalitas” masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan sosial

yang tampak. Oleh karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh.

c. Hegemoni Minimum (*Minimal Hegemony*)

Kesatuan antara ideologis elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dan tidak menginginkan campur tangan masyarakat di dalamnya. Sehingga kelompok hegemonis tersebut tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat.

Dalam sistem dominasi, Foucault (2002) menjelaskan bahwa kekuasaan terkonsolidasikan sehingga membentuk tiga tipe relasi kuasa. Pertama yaitu relasi asimetris, yang di dalamnya terdapat individu – individu yang ter subordinasikan. Kedua, relasi kuasa sebagai permainan strategis antara pihak – pihak yang memiliki kebebasan memilih. Ketiga, relasi kuasa yang dijalankan pemerintah dan tergantung kepada gaya kepemimpinannya.

Kekuasaan sendiri berkaitan dengan aspek *source*, *means*, dan *relation* untuk mendominasi, mengontrol, dan melakukan subordinasi yang dibuat dalam situasi dan proses sosial secara spesifik (Maryani, 2011:56). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kelas – kelas penguasa memiliki otoritas untuk mendominasi dan mengontrol suatu kelompok masyarakat tertentu. Kelas penguasa dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk melakukan praktik – praktik sosial tersebut, yang bertujuan untuk menyampaikan ideologi – ideologi tertentu. Foucault (2004) juga menjelaskan tentang hegemoni yang merupakan suatu model beroperasinya kekuasaan dari sudut pandang strategi politik, legitimasi, dan kepemimpinan intelektual yang terorganisasi dengan mapannya relasi kekuasaan tersebut.

“Domination is a particular type of power relationship that is both stable and hierarchical, fixed and difficult to reverse. Foucault reserves the term “domination” to “what we ordinarily call power”. Domination refers to those asymmetrical relationships of power in which the subordinated persons have little room for manoeuvre because their “margin liberty is extremely limited”” (Foucault, 1988b)

Lebih lanjut lagi Foucault menjelaskannya tentang pemahamannya tentang yang disebut dengan kekuasaan. Kelly (2009) merangkumnya dalam lima poin, antara lain :

- a. *The impersonality, or subjectlessness, of power, meaning that it is not guided by the will of individual subjects*
- b. *The relationality of power, meaning that power is always a case of power relations between people, as opposed to a quantum possessed by people*
- c. *The decentredness of power, meaning that it is not concentrated on a single individual or class;*
- d. *The multidirectionality of power, meaning that it does not flow only from the more to the less powerful, but rather “comes from below,” even if it is nevertheless “nonegalitarian”*
- e. *The strategic nature of power, meaning that it has a dynamic of its own, is intentional”*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, relasi kuasa beroperasi pada pemikiran (ideologi) yang akhirnya mempengaruhi perilaku. Dalam konteks ini adalah antara negara dengan masyarakat, maka relasi tersebut menciptakan prosedur dan aturan yang mampu menundukkan masyarakat sehingga kekuasaan berjalan dalam hubungan yang tidak setara (Sulistya, 2011). Ketidakseimbangan tersebut yang berarti bahwa kekuasaan identik dengan keuntungan sepihak. Pihak penguasa (dalam konteks ini adalah negara) memiliki kemampuan untuk memainkan peranan sosial yang penting dalam masyarakat terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata dalam suatu kelompok masyarakat (Martin, 1995).

Kelimpahan materi tersebut berkaitan dengan ranah ekonomi dalam konteks relasi kuasa. Seperti yang disebutkan oleh Imbeau (2007), bahwa ada tiga bentuk relasi kuasa dalam konteks negara, yaitu *political power*, *economic power*, dan *preceptorial power*. *Political power* bekerja melalui koersi dan tekanan, sama halnya dengan konsep RSA (*Repressie State Apparatus*) milik Althusser yang dijelaskan sebelumnya. *Economic power* bekerja dalam ranah materi kekayaan, *the capacity for a party to a market*

exchange, through compensation, to make the other party forego his property rights over some desired good or service (Imbeau, 2007). Hal tersebut yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan dalam kelimpahan materi di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan *preceptorial power* bekerja melalui pemikiran, sama halnya dengan konsep ISA (*Ideological State Apparatus*) milik Althusser. Sehingga melalui metode-metode seperti koersi dan konsensus yang dilakukan negara terhadap masyarakat dapat menjadi fondasi atau sumber dari relasi kekuasaan (Foucault, 1982b).

1.5.5 Governmentality sebagai Bentuk Relasi Kuasa

Setelah berbicara mengenai ideologi dan bagaimana kaitannya dengan kekuasaan, maka dalam subbab ini akan lebih spesifik membahas mengenai kekuasaan yang berpusat pada negara. Terdapat dua bentuk kekuasaan menurut Foucault (1978a) yang menjadi pengantar menuju *governmentality*, yaitu *disciplinary power* dan *sovereign power*. Jika bisa dipadankan dengan konsep aparatus negara, maka *disciplinary power* merupakan model kekuasaan yang dijalankan oleh ISA (*Ideological State Apparatus*), sedangkan *sovereign power* merupakan model kekuasaan yang dijalankan oleh RSA (*Repressive State Apparatus*).

Sovereign power merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan kedaulatan dan hukum negara, sehingga dijalankan secara represif dan dominatif. Legitimasi operasinya melalui keabsahan hukum untuk mengendalikan warga negaranya. *The sovereign power as legislative, prohibitive and censoring; a power that primarily makes use of the law and law-like-regulations* (Foucault, 1978). Oleh karena itu, model kerja seperti itu yang biasanya dilakukan oleh aparatus negara yang bersifat represif atau dengan istilah/konsep Althusser adalah RSA (*Repressive State Apparatus*).

Sedangkan *disciplinary power* merupakan kekuasaan yang cenderung menormalisasi dan bergerak tanpa diketahui subjeknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekuasaan ini bekerja melalui kesadaran masyarakat. *The disciplines may well be the carriers of a discourse that speaks of a rule, but this rule is not the juridical rule deriving from*

sovereignty, but a natural rule, a norm, the code they come to define is not that law but that of normalization (Foucault, 1994). Foucault (1979) juga menambahkan pemahaman yang lebih eksploratif, bahwa kekuasaan tidak hanya perihal ‘represif’, melainkan juga bisa membuat sesuatu terjadi, membangun gagasan dengan penderitaan dan kesenangan. Hal tersebut berkaitan tentang cara kerja kekuasaan dalam mengendalikan perilaku individu melalui kesadaran berpikir secara tidak langsung.

Konsep *disciplinary power* lah yang kemudian dikembangkan menjadi konsep *governmentality* oleh Foucault. *Governmentality* merupakan perluasan model kekuasaan tersebut pada level negara, sehingga akan berbicara mengenai isu teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara (Mudhoffir, 2011). Bisa dikatakan bahwa *governmentality* merupakan bentuk relasi kuasa yang akan berpusat pada kepentingan negara dan selalu akan di bawah kontrol negara.

Governmentality disebut juga sebagai *conduct- of conduct* , suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan tindakan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka (Foucault, 1982b). Negara mengatur tindakan dan perilaku masyarakat agar menjadi populasi yang tunduk dan patuh. Selalu ada wacana yang berdiri dibalik ideologi yang dibentuk oleh suatu negara agar kekuasaannya tetap beroperasi secara terstruktur. Secara tidak langsung, *governmentality* merupakan bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara agar beroperasinya diakui atau dilegitimasi.

Conduct of conduct bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara (Foucault, 1982). Penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominan terhadap subjek yang didominasi, sehingga subjek tersebut tidak memiliki ruang untuk bermanuver atau

menentukan pilihan dalam bertindak (Foucault, 1982a). Kedua gagasan tersebut yang menjadi ciri dari governmentality itu sendiri, bagaimana kekuasaan bekerja dalam sistem yang terstruktur dan dijalankan oleh negara untuk menundukkan masyarakatnya, sehingga tujuan dan kepentingan negara bisa tercapai.

Dalam pelaksanaannya, governmentality tentunya bekerja dalam berbagai wilayah kenegaraan, misalnya dalam berbagai sektor-sektor pemerintahan. Relasi kekuasaan yang bekerja memanfaatkan fungsi wacana sebagai rezim kebenaran, menggunakan aparatus disiplin dalam normalisasi praktik sosial. Bentuk relasi dalam pendisiplinan tubuh individu ini merupakan relasi dominasi (Foucault, 1982b).

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, governmentality bekerja dalam sistem negara demokrasi melalui wacana kebebasan tersebut. Seperti pada konsep *conduct-of-conduct* dalam governmentality, dimana terdapat adanya suatu tindakan tertentu yang seolah-olah dapat menghadirkan berbagai kemungkinan pilihan tindakan, tetapi individu itu sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara. Governmentality bekerja melalui fungsi wacana kebebasan dalam demokrasi yang kemudian diarahkan pada tindakan yang memang dikehendaki oleh negara.

Begitupula dengan berbagai wilayah kenegaraan, governmentality bekerja melalui wacana-wacana kekuasaan di setiap sektor pemerintahan yang berjalan. Setiap sektor pun memiliki program-program yang dijalankan yang tidak lepas dengan relasinya dengan masyarakat. Selain itu, governmentality pun bisa bekerja melalui konstitusi kebijakan, dimana merupakan bentuk konkrit dari governmentality dalam mengatur, membentuk, dan mengarahkan rakyat bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki negara.

Merujuk pada pemahaman Foucault tentang model-model kekuasaan dan pemahaman-pemahaman lainnya mengenai ideologi dan hegemoni, maka dapat diurai beberapa ciri yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk relasi kuasa governmentality, antara lain:

1. Adanya prosedur dan aturan yang menimbulkan penundukan secara hegemonik
2. Berjalan dalam hubungan yang tidak setara
3. Beroperasi pada pemikiran (ideologi) yang mempengaruhi perilaku
4. Adanya pola ketergantungan yang tidak seimbang
5. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak dari suatu kelompok tertentu (Martin, 1995)
6. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam masyarakat, terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata dalam suatu kelompok masyarakat. (Martin, 1995)
7. Adanya dominasi yang merupakan bagian dari relasi kuasa dan bersifat stabil, hierarkis, tetap, dan tidak bisa ditukar. Dominasi merujuk pada bentuk relasi yang asimetris dimana salah satu pihak yang didominasi hanya memiliki sedikit ruang untuk bertindak karena hak kebebasannya terbatas (Foucault, 1988b).

1.5.6 Metode *Critical Discourse Analysis*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana kritis, dimana metode ini melihat bahasa atau teks sebagai suatu media pembawa wacana yang memiliki makna tertentu dibalik teks tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough (1995), Fairclough berfokus pada pengembangan kerangka analisis dalam mencari hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan. Analisis wacana kritis tidak hanya menginterpretasi suatu teks saja, tetapi juga menghubungkan dengan konteks tujuan dan praktik sosial tertentu yang terkandung dalam teks tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Badara (2012:27), metode tersebut menekankan bahwa untuk memperoleh pemahaman teks secara utuh, analisisnya harus diletakkan pada sebuah konteks sosiokultural dan latar belakang aktor pembuat teks.

Fairclough (1995) menjelaskan 3 hal yang mendasari analisis wacana kritis dalam melihat hubungan antara penggunaan bahasa, ideologi, dan kekuasaan.

1. Pada dasarnya, nilai – nilai ideologis tertentu akan disampaikan atau dinyatakan secara implisit.
2. Interaksi – interaksi tertentu, secara verbal maupun tertulis (teks), akan melibatkan aspek interpersonal dalam bentuk yang ideologis.
3. Kekuasaan merupakan bagian dari ideologi dan kekuasaan tersebut yang membentuk wacana dan praktik – praktik dominasi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nilai – nilai ideologis terletak pada sesuatu yang bersifat implisit, karena nilai – nilai ideologis tersebut dianggap menjadi suatu hal yang wajar dan terjadi secara natural dalam masyarakat. Paradigma ini melihat bahwa dalam representasi ideologis dalam masyarakat dibentuk oleh adanya relasi kuasa.

Fairclough (1995) memaparkan bahwa dalam suatu institusi sosial menghasilkan aksi sosial yang didalamnya terdapat interaksi (melalui bahasa). Interaksi tersebut yang menjadi medium untuk menyampaikan nilai – nilai ideologis yang membentuk konstruksi sosial dalam masyarakat. *Institutions construct their ideological and discoursal subjects, they construct them in the sense that they impose ideological and discoursal constraints upon them as a condition for qualifying them to acts as subjects* (Fairclough, 1995:39). Sehingga kita bisa melihat dan membedakan pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi dalam pengaruh relasi kuasa.

Berdasarkan tulisan milik Fairclough (1995), analisis wacana kritis memiliki beberapa karakteristik, seperti yang dijelaskan oleh Badara (2012:29), antara lain:

a. Tindakan

Wacana dipahami sebagai suatu tindakan / *action*, sehingga wacana dianggap sebagai suatu bentuk interaksi dengan orang lain. Pemahaman ini membuat wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Selain itu, wacana juga dipandang sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol.

b. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks – konteks tertentu. Pembentukan dan produksi wacana didasari oleh konteks seperti situasi, kondisi, peristiwa atau fenomena tertentu. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi penggunaan bahasa dalam pembentukan wacana, misalnya partisipan dalam bahasa, situasi ketika teks diproduksi, fungsi dan tujuan yang dimaksudkan, dan sebagainya. Sehingga wacana dimaknai dan diinterpretasi sebagai teks dan konteks secara bersamaan.

c. Historikal

Wacana dimaknai dan diinterpretasi sebagai teks dan konteks secara bersamaan, maka teks tidak dapat dimaknai secara utuh jika tidak menyertakan konteks yang menyertainya, salah satunya adalah konteks secara historikal. Misalnya, situasi sosial politik, suasana pada saat itu, dan bagaimana situasi tersebut bisa terjadi.

d. Kekuasaan

Analisis wacana kritis mempertimbangkan unsur kekuasaan di dalamnya. Wacana tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan netral, tetapi terdapat aspek – aspek yang menyangkut relasi kuasa dalam suatu hubungan tertentu. Adanya kekuasaan tersebut yang memunculkan dominasi kuasa tertentu, satu pihak mendominasi pihak lain.

e. Ideologi

Sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi (Zoest dalam Badara, 2012:33). Analisis wacana kritis melihat adanya nilai – nilai ideologi tertentu pada suatu teks yang sengaja dibuat dan hendak disampaikan kepada khalayak. Wacana dalam pendekatan ini digunakan oleh kelompok/kelas tertentu sebagai medium penyampaian nilai – nilai ideologi, mempersuasi dan mengomunikasikan kekuasaan dan dominasi ideologi tertentu.

Menurut Fairclough dalam Eriyanto (2001:285), metode analisis wacana kritis ini menitikberatkan bahasa sebagai praktik kekuasaan.

Penggunaan bahasa dalam membawa dan menyampaikan nilai – nilai ideologis tertentu yang membutuhkan analisis wacana secara kritis dan menyeluruh. *The notion of discourse is that language is a material form of ideology, and language is invested by ideology* (Fairclough, 1995:73).

Eriyanto (2012) menjelaskan bahwa Fairclough membagi analisis wacana kritis ini dalam tiga dimensi, yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

a. *Text*

Dimensi ini menganalisis teks secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Fairclough (1995) menganggap teks memiliki karakteristik yang beragam dan bersifat kontradiktif. Oleh karena itu, dimensi ini melakukan intertekstualitas, menemukan adanya koherensi antarkata dan antarkalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna tertentu. Keberagaman karakteristik dari suatu teks disusun sedemikian rupa yang membentuk makna – makna tertentu, analisis ini berusaha untuk mencari kontras antara fakta peristiwa tertentu yang sebenarnya dengan apa yang digambarkan dalam teks tersebut. Fairclough menguraikannya menjadi tiga unsur :

1. Representasi, bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
2. Relasi, bagaimana hubungan antara pembuat teks, khalayak, dan partisipan dalam teks ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
3. Identitas, bagaimana identitas pembuat teks, khalayak, dan partisipan dalam teks ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

b. *Discourse Practice*

Analisis *discourse practice* menitikberatkan pada bagaimana produksi teks, teks dibentuk melalui suatu praktik wacana yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Fairclough (1995) melihat adanya hubungan yang kompleks antara praktik wacana yang bentuk (produksi teks) dengan praktik formal (konvensi). Pada analisis ini membutuhkan sudut pandang dari pembuat teks yang menjadi jembatan antara

interpretasi teks secara linguistik dan konteks praktik sosial budaya di luar teks.

c. *Sociocultural Practice*

Analisis *sociocultural practice* didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial budaya yang ada di luar teks mempengaruhi bagaimana wacana yang dibangun dalam teks tersebut. Fairclough membuat tiga level analisis pada *sociocultural practice*, antara lain :

1. Situasional

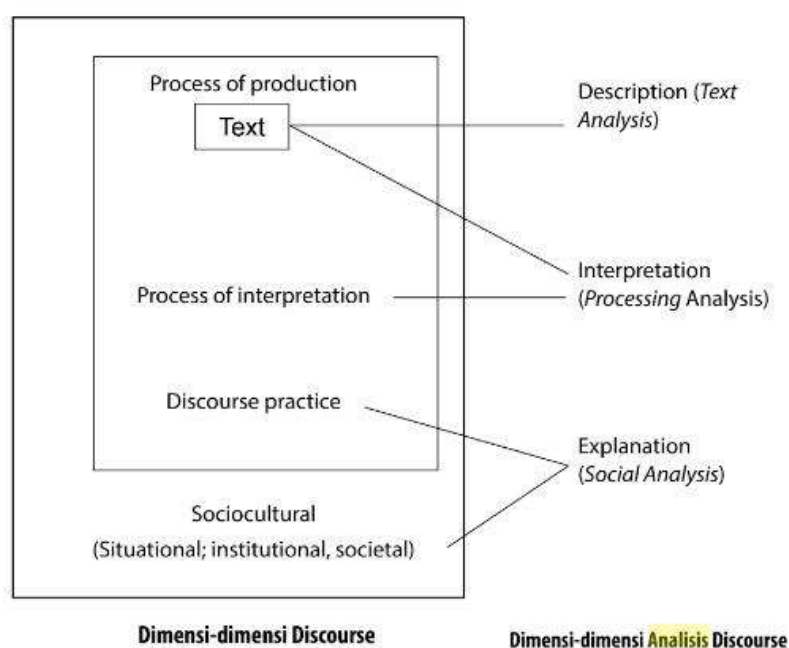
Teks diproduksi dalam suatu kondisi yang khas, unik, sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Dengan kata lain, wacana dalam teks sengaja diproduksi sebagai bentuk tindakan responsif atas suatu kejadian atau fenomena tertentu.

2. Institusional

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi sosial, dalam konteks ini adalah negara, secara ekonomi maupun politik dalam praktik produksi wacana.

3. Sosial

Faktor – faktor sosial berpengaruh terhadap produksi wacana dalam suatu teks, misalnya adanya perubahan dalam aspek sosial pada masyarakat, sistem politik, sistem ekonomi, atau pun sistem budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Sistem tersebut yang menentukan siapa yang berkuasa, nilai – nilai apa yang dominan dalam masyarakat, dan bagaimana nilai – nilai tersebut saling mempengaruhi.



Gambar 1.5.6.1 Kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough (Fairclough, 1995)

Berdasarkan kerangka analisis wacana kritis milik Fairclough di atas, untuk memperoleh pemahaman dan hasil analisis secara menyeluruh, maka analisisnya harus diletakkan dalam sebuah konteks sosial budaya yang berdasarkan pada proses produksi teks dan interpretasi teks.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah wacana relasi kuasa antara negara dan rakyat yang terdapat dalam lirik lagu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* milik Band .Feast. Maka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Salim (2006), penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan pendekatan interpretatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam mengenai wacana – wacana relasi kuasa yang dibangun dalam lirik lagu tersebut.

1.6.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi wacana relasi kuasa antara negara dan rakyat dalam lirik lagu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* milik Band .Feast, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksploratif. Menurut Kriyantono (2006), riset eksploratif digunakan untuk menggali data, tanpa mengoperasionalisasikan konsep atau menguji konsep pada realitas yang diteliti.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* milik Norman Fairclough. Model analisis wacana kritis ini menitikberatkan pada bahasa sebagai bentuk praktik kekuasaan dalam menyampaikan nilai – nilai ideologis. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Fairclough dalam Eriyanto, 2001:285).

Seperti yang sudah dijelaskan di tinjauan pustaka, Fairclough membagi analisis wacana kritis menjadi tiga dimensi, antara lain:

a. *Text*

Analisis teks secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Fairclough (1995) menganggap teks memiliki karakteristik yang beragam dan bersifat kontradiktif. Oleh karena itu, dimensi ini melakukan intertekstualitas, menemukan adanya koherensi antarkata dan antarkalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna tertentu. Keberagaman karakteristik dari suatu teks disusun sedemikian rupa yang membentuk makna – makna tertentu, analisis ini berusaha untuk mencari kontras antara fakta peristiwa tertentu yang sebenarnya dengan apa yang digambarkan dalam teks tersebut

b. *Discourse Practice*

Analisis *discourse practice* menitikberatkan pada bagaimana produksi teks, teks dibentuk melalui suatu praktik diskursus yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Dimensi ini menjadi

jembatan antara interpretasi teks secara linguistik dan konteks praktik sosial budaya di luar teks.

c. *Sociocultural Practice*

Analisis *sociocultural practice* didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial budaya yang ada di luar teks mempengaruhi bagaimana wacana yang dibangun dalam teks tersebut. Terdapat tiga level konteks analisis dalam *sociocultural practice*, yaitu level situasional, institusional, dan sosial.

Sehingga peneliti melakukan tiga tahap analisis tersebut untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi wacana relasi kuasa antara negara dan rakyat dalam narasi teks lirik lagu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* milik Band .Feast.

1.6.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wacana relasi kuasa antara negara dan rakyat dalam lirik lagu yang berjudul *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat* milik Band .Feast.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini berdasarkan pembagian dimensi menurut Fairclough adalah:

- a. *Text* : Teks lirik lagu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat*
- b. *Discourse Practice* : Transkrip wawancara dengan pembuat lirik
- c. *Sociocultural Practice* : Wacana dengan konteks sosial budaya

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan untuk mengamati hal – hal yang terkait dengan Band .Feast dan lagu – lagunya yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu *Kami Belum Tentu* dan *Padi Milik Rakyat*.

Observasi dilakukan dengan mengamati karya – karya lagu, artikel, dan aksi panggung dari Band .Feast. Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga didapat dari transkrip wawancara mendalam terkait wacana yang diteliti dalam lirik lagu dengan pembuat teks, dalam penelitian ini adalah vokalis dari Band .Feast.

Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mendapatkan datanya dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dari dokumen seperti lirik lagu, buku, internet, dan artikel – artikel yang berkaitan dengan wacana dalam lirik lagu.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul yang kemudian data tersebut dinarasikan dengan tahapan *processing analysis* dan *social analysis*. *Processing analysis* adalah proses interpretasi teks, hal ini berkaitan dengan praktik diskursif yang dilihat dari sudut pandang peneliti. Kemudian, peneliti melakukan intertekstualitas yaitu menghubungkan hasil interpretasi teks dengan literatur dan referensi. Setelah itu dilakukan analisis transkrip wawancara mendalam dengan pembuat teks, yang merupakan praktik diskursif yang dilihat dari sudut pandang pembuat teks. Tahap selanjutnya yaitu *social analysis*, hasil dari interpretasi dan pemaknaan teks tersebut diletakkan dan dihubungkan dengan konteks sosial budaya terkait wacana yang diteliti.